

ANALISIS KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BATANG

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

ANALISIS KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BATANG

2021



Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Batang 2021

ISSN	:	-
Katalog	:	4101043.3325
No Publikasi	:	33550.2105
Ukuran Buku	:	A4
Jumlah Halaman	:	viii + 40
Naskah	:	BPS Kabupaten Batang
Penyunting	:	BPS Kabupaten Batang
Gambar Kulit	:	BPS Kabupaten Batang
Diterbitkan Oleh	:	@ BPS Kabupaten Batang
Dicetak Oleh	:	CV. Vertikal Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Pengarah	:	Eddy Prawoto
Penanggung Jawab	:	Sri Winarsih
Editor	:	Sri Winarsih
Penulis	:	Ayu Tiara Ashar Putri
Desain Kulit	:	Ayu Tiara Ashar Putri
Desain dan Tata Letak	:	Ayu Tiara Ashar Putri

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita.

Angka IPM disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPM secara periodik menurut wilayah memungkinkan setiap wilayah mengetahui peta pembangunan manusia di daerahnya, baik pencapaian, kecepatan, posisi maupun disparitas antardaerah.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang tahun 2021 telah mencapai 68,92. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Batang berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'sedang'.

Pencapaian tersebut, menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antarindividu dan antarwilayah.

Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Batang, serta bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Batang pada masa mendatang.

Batang, Juni 2022
Kepala BPS Kabupaten Batang



Eddy Prawoto

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia.....	4
1.3 Tujuan Penyusunan Publikasi	5
1.4. Sumber Data Penyusunan Publikasi.....	5
1.5. Susunan Publikasi	5
Bab II. Metodologi Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.....	8
2.1 Perubahan Metodologi IPM	8
2.2 Implementasi IPM Metode Baru	12
2.3 Konsep dan Definisi	14
2.4 Ukuran Pencapaian dan Klasifikasi IPM.....	18
Bab III. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Batang	20
3.1 Kabupaten Batang dalam Jajaran Kabupaten di Jawa Tengah.....	20
3.2 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Batang	24
Bab IV. Capaian Kapabilitas Dasar	28
4.1 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan	28
4.2 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan	33
4.3 Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi	35
Daftar Pustaka.....	39

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Simulasi Rata-rata Aritmetik dan Rata-rata Geometrik	10
Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM.....	16
Tabel 2.3. Klasifikasi Capaian IPM.....	18
Tabel 4.1. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Batang, 2020-2021.....	29
Tabel 4.2. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Batang, 2020-2021.....	34

<https://batangkab.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Tahap Perubahan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP.....	9
Gambar 2.2. Perbedaan IPM Metode Lama vs Metode Baru.....	13
Gambar 2.3. Konsep IPM	15
Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang dan Jawa Tengah, 2011-2021.....	20
Gambar 3.2. Nilai IPM Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021.....	21
Gambar 3.3. Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021.....	21
Gambar 3.4. Usia Harapan Hidup Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021.....	22
Gambar 3.5. Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021 (Tahun)	23
Gambar 3.6. Rata-rata Lama Sekolah Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021 (Tahun).....	23
Gambar 3.7. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021 (Juta Rupiah).....	24
Gambar 3.8. Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Batang, 2011-2021.....	25
Gambar 3.9. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Batang, 2011-2021 (Tahun).....	26
Gambar 3.10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang, 2011 – 2021 (Tahun).....	26
Gambar 3.11. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Batang, 2011–2021 (juta rupiah)..	27
Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sendiri di Kabupaten Batang, 2020-2021.....	29
Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Tanah di Kabupaten Batang, 2020-2021.....	30
Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih di Kabupaten Batang, 2011-2021 (persen).....	30
Gambar 4.4. Tren Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Batang, 2013-2020.....	31

Gambar 4.5. Proporsi Persalinan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Kabupaten Batang, 2011 – 2021 (persen).....	32
Gambar 4.6. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Batang, 2010-2021.....	33
Gambar 4.7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Batang, 2011 – 2021 (persen).....	35
Gambar 4.8. Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang, 2011 – 2020.....	36

<https://batangkab.bps.go.id>

PEMBANGUNAN MANUSIA

bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).



IPM Kabupaten Batang 2021
68,92

<https://batangkab.go.id>



The illustration at the bottom of the page depicts a group of diverse people engaged in various activities. On the left, a woman stands with her arms raised in celebration. Next to her, a woman sits at a desk working on a laptop. In the center, a man stands with his arms raised, and another man sits in a chair also working on a laptop. On the right, a man stands with his arms raised. A large yellow arrow points upwards and to the right, symbolizing growth and progress. Several blue gears of different sizes are scattered in the background, representing industry and technology. In the bottom right corner, there is a colorful geometric pattern consisting of triangles and squares in shades of blue, orange, and white.

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebelum tahun 1970, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Simth, 2003). Perhatian dunia tertuju pada diskusi tentang pendapatan, modal, pertumbuhan ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Seiring berjalannya waktu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin adanya perbaikan taraf hidup sebagian besar penduduk. Data empiris menunjukkan bahwa beberapa negara yang mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi memang ukuran yang penting dalam pembangunan, namun kedua indikator tersebut belum menjelaskan tujuan utama pembangunan, yaitu untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan komposisi penduduk atau penerima manfaat nyata. Kedua, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi kerja yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial ekonomi telah sejak lama terjadi. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh berbagai kalangan yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan indikator baru yang berfokus pada pembangunan manusia.

Secara perlahan konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep pembangunan manusia tidak hanya memperhitungkan aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR). Dalam

laporannya UNDP menjelaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya *input* dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Pada tahun 1996, *United Nation Development Programme* (UNDP) untuk pertama kalinya mempublikasikan konsep *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui *Human Development Report* (HDR) yang kemudian berlanjut setiap tahun. Pada laporan tersebut mengartikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Publikasi ini juga mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Laporan IPM juga dirilis setiap tahunnya secara global oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Konsep yang digunakan masih sama dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu usia, pendidikan dan ekonomi. Hanya saja pendekatan kalkulasinya saja yang berbeda. Hasilnya untuk tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara yang dianalisis oleh UNDP. Indonesia berada di peringkat tengah. Namun apabila merujuk pada skor IPM RI versi UNDP maka statusnya tergolong tinggi.

Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Untuk semua aspek yang dievaluasi Indonesia jelas tertinggal jauh dari Singapura yang menyandang predikat IPM sangat tinggi dan berada di peringkat 11 dunia. Jika dibandingkan dengan Brunei pun masih tertinggal. Bahkan untuk semua aspek Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia (cnbcindonesia.com).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengaplikasikan penghitungan IPM tersebut untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di Indonesia, baik untuk level provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki nilai IPM sebesar 72,29. Ada kenaikan 0,35 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada di 71,94. Tinggi rendahnya nilai pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh komponen-komponen penyusun IPM tetapi juga dipengaruhi oleh indikator-indikator lain, seperti jumlah tenaga dan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kemudahan untuk mengaksesnya, kesadaran masyarakat mengenai arti penting pendidikan, pengetahuan

tentang kesehatan, distribusi pendapatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, publikasi ini juga menampilkan indikator lain yang turut mempengaruhi IPM.

Untuk mendorong penggunaan pendekatan pembangunan manusia dalam proses perencanaan daerah, maka pada tahun 1998, IPM dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah yaitu "Pola Dasar Pembangunan Daerah". Apalagi setelah dilaksanakannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah, mengisyaratkan bahwa azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata.

Pemerintah daerah Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kabupaten Batang yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga salah satu misi pembangunan Kabupaten Batang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Data IPM merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi pembangunan sumber daya manusia setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

1.3 Tujuan Penyusunan Publikasi

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah:

1. Menggambarkan potensi sumber daya manusia Kabupaten Batang,
2. Menyajikan analisis situasi pembangunan manusia berdasarkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian Kabupaten Batang,
3. Menyajikan analisis tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Batang, yang diukur dengan IPM dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sumber Data Penyusunan Publikasi

Data yang digunakan dalam analisis situasi pembangunan adalah IPM Metode Baru Tahun 2011-2021. Dengan demikian IPM yang dihasilkan merefleksikan tingkat pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Batang pada tahun 2011-2021. Data primer yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) tahun 2011-2021 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2011-2021 untuk mendapatkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Batang tahun 2011-2021. Selain data primer, ada pula penggunaan data sekunder dari publikasi Kabupaten Batang Dalam Angka 2022.

1.5 Susunan Publikasi

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis IPM Kabupaten Batang selama tahun 2011-2021. Data IPM secara series dapat dilihat pada tabel lampiran. Secara khusus, publikasi ini berisi:

1. Pendahuluan
2. Metodologi Indeks Pembangunan Manusia
3. Capaian Pembangunan Manusia Kabupaten Batang
4. Capaian Kapabilitas Dasar Pembangunan Manusia Kabupaten Batang

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

01

Umur Harapan Hidup
Saat Lahir
(UHH)

02

Harapan Lama Sekolah
(HLS)
Rata-rata Lama Sekolah
(RLS)

03

Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan:
96 Komoditas PPP



Bab II. Metodologi Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

2.1 Perubahan Metodologi IPM

Awalnya UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak diukur dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi tersebut menjadi sebuah indeks komposit, yang digunakan adalah dengan rata-rata aritmatik.

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia serta melakukan kajian dalam rangka penyempurnaan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Sampai saat ini UNDP telah dua kali melakukan penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 serta dilakukan perubahan pada tahun 2010.

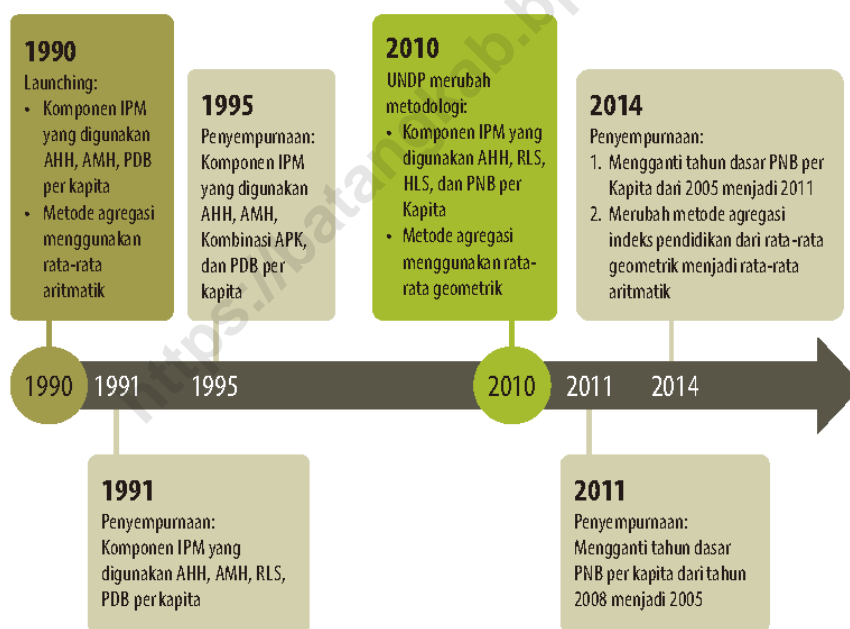
Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama dengan sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan drastis pada metodologi penghitungan IPM. Dalam metode baru ini, beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan

Indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Scholling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP mengubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Gambar 2.1 Tahap Perubahan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP



Keterangan:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| AHH : Angka Harapan Hidup saat lahir | APK : Angka Partisipasi Kasar |
| AMH : Angka Melek Huruf | HLS : Harapan Lama Sekolah |
| RLS : Rata-rata Lama Sekolah | PNB : Produk Nasional Bruto |
| PDB : Produk Domestik Bruto | |

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Pemilihan metode dan variabel yang tepat akan menghasilkan indeks yang cukup relevan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Namun sebenarnya alasan utama yang

dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur kualitas pendidikan, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM. Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita, indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi, termasuk juga investasi dari asing. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3 dan 3. Dengan rata-rata aritmatik diperoleh bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3+3+3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3 dan 4, maka rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2+3+4) / 3 = 3$. Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Misal capaian ketiga dimensi berturut-turut menjadi 1, 3 dan 5, maka dalam kondisi yang ekstrim ini rata-rata pembangunan manusia akan tetap 3. Sehingga dalam 3 macam kondisi yang

berbeda-beda jika menggunakan rata-rata aritmatika akan menghasilkan indeks komposit yang sama. Rata-rata aritmatika menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasilnya dapat ditutupi oleh dimensi lain yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks, yaitu menghitung agregasi indeks dengan menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM antara lain:

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Keunggulan penggunaan IPM dengan Metode Baru antara lain:

- Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Ø Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

- Ø PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah lebih dari 90 persen, sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometric, juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

2.2 Implementasi IPM Metode Baru

Setelah mempelajari secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan IPM metode lama, Indonesia perlu memperbaiki penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dengan sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Gambar 2.2. Perbedaan IPM Metode Lama vs Metode Baru

Metode Lama	Metode Baru
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 th +	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
Rata-rata Hitung	Rata-rata Geometrik
Reduksi <i>Shortfall</i> (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

Badan Pusat Statistik melakukan beberapa penyesuaian dalam metode baru penghitungan IPM. Salah satunya adalah dengan melakukan proksi terhadap PNB per kapita dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hal ini terkait dengan ketersediaan data yang ada. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, akan tetapi data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meskipun pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan. Pada metode lama terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli, sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tidak mengalami perubahan pada metode baru ini, akan tetapi sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan karena relevansinya serta ketersediaannya hingga tingkat kabupaten/kota.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan indikator baru, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator AMH sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, yakni semua daerah memiliki AMH lebih dari 90 persen. Sedangkan untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tetap dipertahankan karena masih relevan dalam

menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Hanya saja cakupannya diganti, yakni pada metode lama, pada cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, sementara pada metode baru, cakupan yang dihitung adalah penduduk usia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan utama lain yaitu bahwa pada umumnya proses pendidikan penduduk yang berusia 25 tahun telah selesai. Sehingga bisa dikatakan bahwa penduduk 25 tahun atau lebih merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan *rata-rata aritmatik*, sementara pada metode baru menggunakan *rata-rata geometrik*. Metode agregasi pada metode baru merupakan penyempurnaan dari metode lama, karena rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibandingkan rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*, sedangkan pada metode baru diukur dengan menggunakan *pertumbuhan aritmatik*. Reduksi *Shortfall* secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Sedangkan pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.

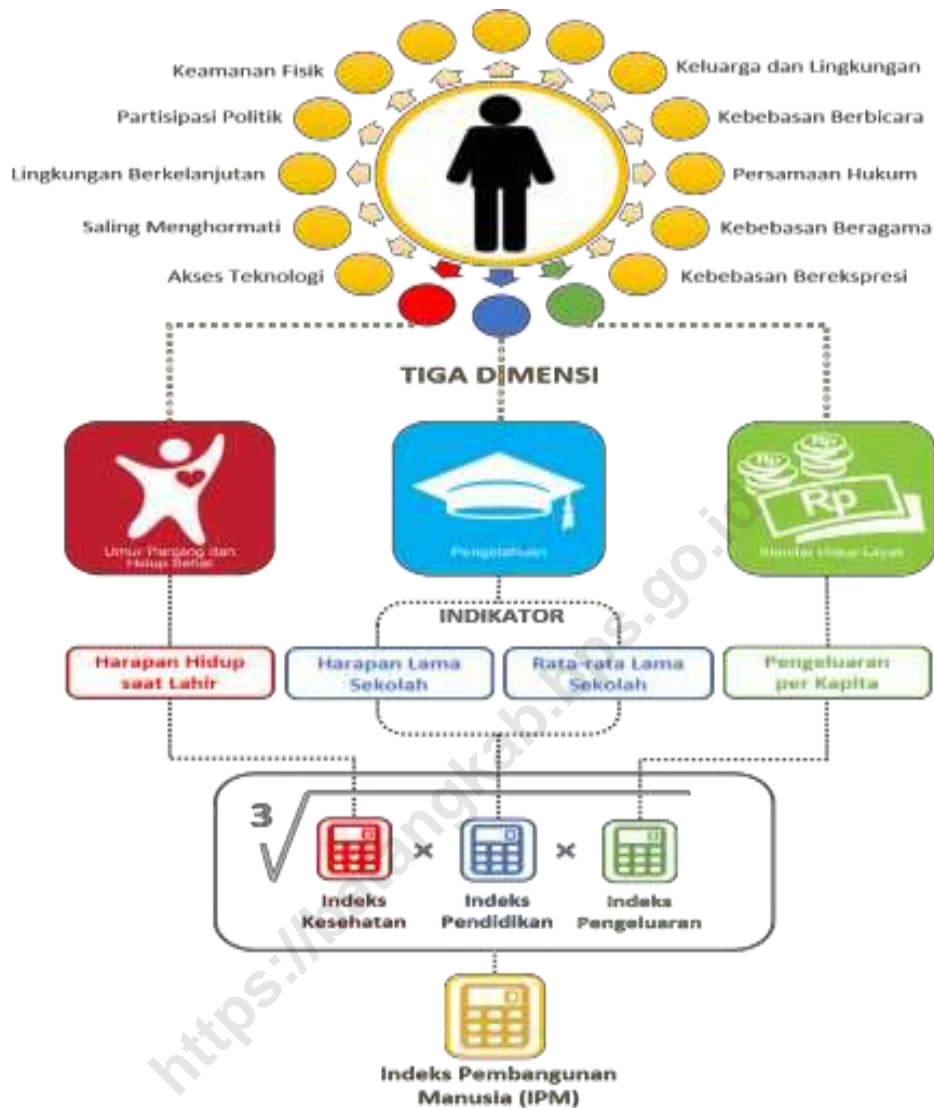
2.3 Konsep dan Definisi

2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan mengenai penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar:

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Gambar 2.3. Konsep IPM



Sesuai dengan Gambar 2.1, bahwa indikator/komponen IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP). Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum atau dihitung indeksnya kemudian IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Secara rumus yaitu:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Keterangan

IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 Ikesehatan : Indeks Kesehatan
 Ipendidikan : Indeks Pendidikan
 Ipengeluaran : Indeks Pengeluaran

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Tabel 2.2. Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maximum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100	1.007.436	107.721	26.572.352
		(PPP US\$)	* (Rp)	(PPP US\$)	** (Rp)

Sumber : BPS dan UNDP

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara - Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.3.2. Umur Harapan Hidup Saat Lahir – UHH (*Life Expectancy* – e_0)

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik

sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH diharapkan mencerminkan “lama hidup” sekaligus “derajat kesehatan” suatu masyarakat.

UHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. UHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan UHH Negara maju karena UHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

2.3.3 Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling* - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, maka rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

2.3.4 Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling* - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun atau lebih. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

2.3.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Dengan dimasukkannya variabel Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan yang dapat digunakan untuk menghitung “paritas daya beli” maka IPM jelas lebih “lengkap” dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia. Menurut UNDP, masyarakat ideal selain harus memenuhi kondisi peluang hidup panjang (dan sehat) serta tingkat

pendidikan (dan keterampilan) yang memadai juga harus mempunyai peluang kerja/berusaha yang memadai sehingga memperoleh sejumlah “uang” yang memiliki daya beli (*purchasing power*).

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity – PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dengan 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

2.4 Ukuran Pencapaian dan Klasifikasi IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. ***Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.***

Dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel 2.3. Klasifikasi Capaian IPM

Klasifikasi	Capaian IPM
(1)	(2)
Sangat Tinggi	IPM>80
Tinggi	70≤IPM<80
Sedang	60≤IPM<70
Rendah	IPM<60

Sumber: BPS

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BATANG

BAB 3

Umur Harapan Hidup
Saat Lahir
(UHH)

74,74
tahun

Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan (PPP)

9,52
juta

IPM

Kabupaten Batang 2021

68,92

Harapan Lama
Sekolah (HLS)

12,13 tahun

Rata-rata Lama
Sekolah (RLS)

6,88 tahun

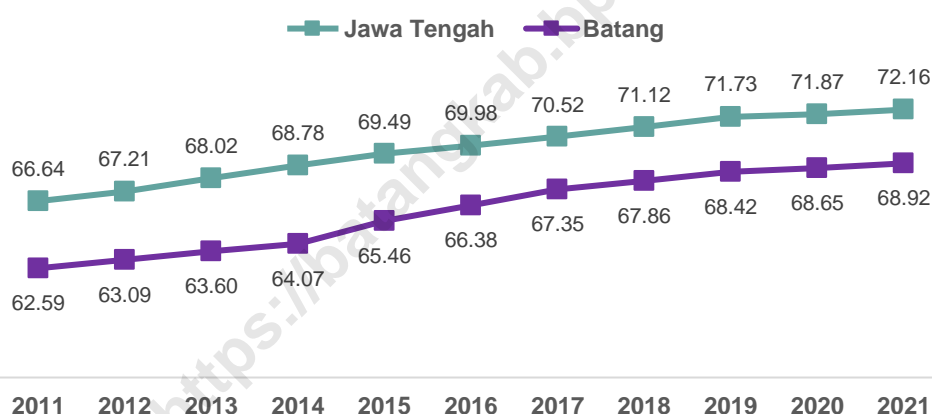


Bab III. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Batang

3.1 Kabupaten Batang dalam Jajaran Kabupaten di Jawa Tengah

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Selama kurun waktu 2011 hingga 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kabupaten Batang setiap tahunnya rata-rata tumbuh 1,02 persen. Meskipun capaian IPM Kabupaten Batang berada di bawah capaian Jawa Tengah, namun kecepatan tumbuh IPM Kabupaten Batang selama sepuluh tahun terakhir berada di atas pertumbuhan Jawa Tengah yang sebesar 0,80 persen per tahun.

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang dan Jawa Tengah, 2011-2021

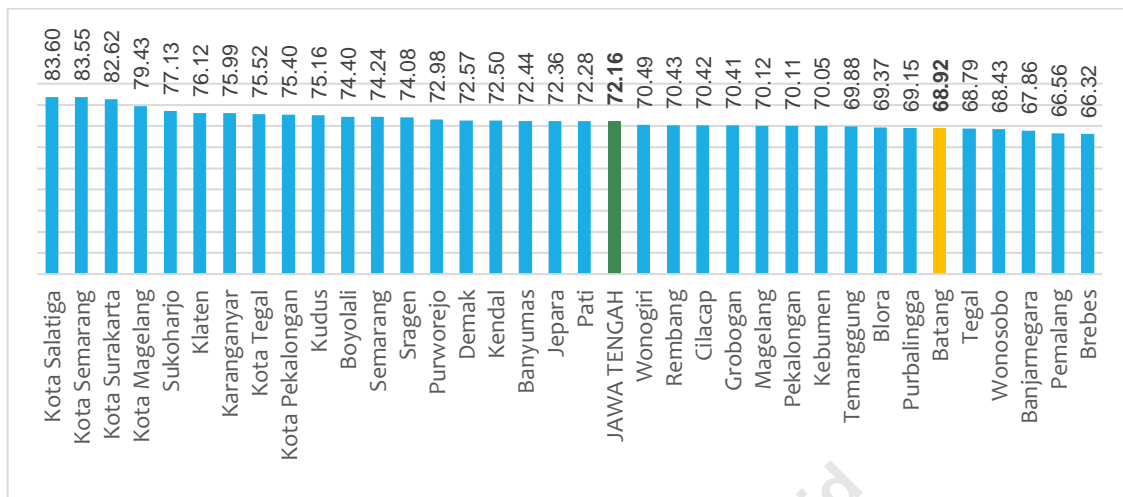


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batang tahun 2021 telah mencapai 68,92. Hal ini berarti capaian IPM Kabupaten Batang berada pada posisi status pembangunan manusia kategori ‘*sedang*’. Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Batang pada posisi 30 dari 35 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah.

IPM Kabupaten Batang sebesar 68,92 berada pada level “sedang” tersebut memang lebih baik dari Kabupaten Tegal, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes. Pada dua puluh sembilan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Tengah, capaiannya sudah melampaui Kabupaten Batang. Kota Salatiga memiliki capaian IPM tertinggi yaitu 83,60 dan telah masuk pada kategori ‘*sangat tinggi*’, termasuk Kota Semarang dan Kota Surakarta telah masuk kategori ‘*sangat tinggi*’. Selain ketiga kota tersebut, ada delapan belas Kabupaten/Kota yang masuk pada kategori ‘*tinggi*’.

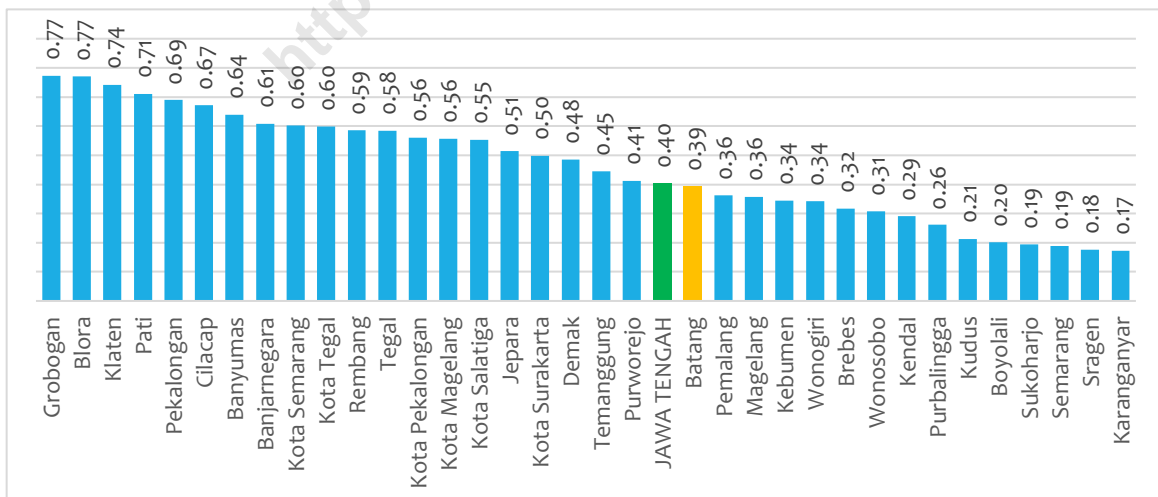
Gambar 3.2 Nilai IPM Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Selisih capaian IPM Kota Salatiga dengan IPM Kabupaten Batang cukup tinggi, yaitu 14,68 poin. Tingginya selisih capaian ini disebabkan oleh cukup jauhnya perbedaan capaian komponen IPM diantara keduanya, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dan harapan lama sekolah (HLS). Kota Salatiga menjadi yang tertinggi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pertumbuhan IPM kabupaten/ kota se Jawa Tengah pada Gambar 3.3 di bawah ini.

Gambar 3.3 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021



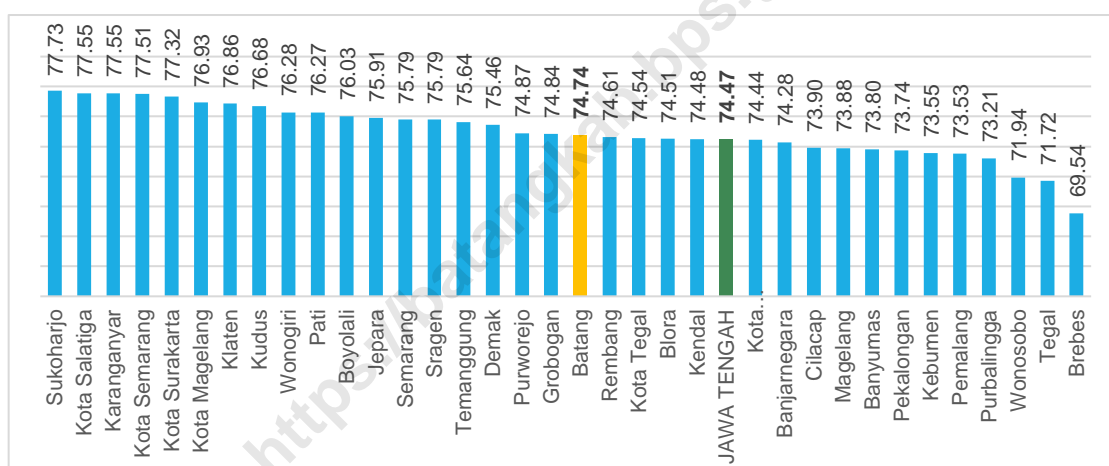
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Level pembangunan manusia yang tinggi bukan menjadi satu-satunya indikator dalam melihat pencapaian pembangunan manusia. Perkembangan pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator penting. Perkembangan IPM Kabupaten Batang

tahun 2021 berada di urutan ke-21, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pada tahun 2021, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Batang mencapai 74,74 tahun, sedangkan capaian UHH tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo (77,73 tahun. UHH Kabupaten Batang lebih rendah 2,99 tahun jika dibandingkan Kabupaten Sukoharjo. Capaian UHH Kabupaten Batang masih lebih baik daripada Jawa Tengah (74,47 tahun). UHH mengindikasikan bahwa jika di Kabupaten Batang ada bayi baru lahir, maka memiliki harapan hidup hingga usia 74,74 tahun, sedangkan di Kabupaten Sukoharjo bayi baru lahir memiliki harapan hidup lebih panjang, yakni mencapai 77,73 tahun. UHH kabupaten/kota se Jawa Tengah seperti tertera pada Gambar 3.4 berikut ini.

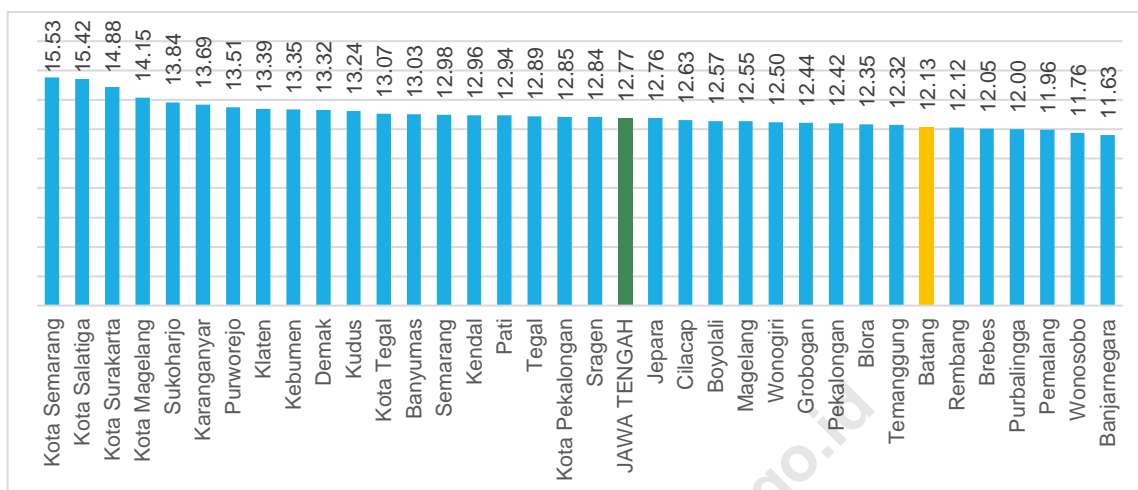
Gambar 3.4 Usia Harapan Hidup Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2021, di bidang pendidikan, komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi dicapai oleh Kota Semarang sebesar 15,53 tahun, sedangkan capaian HLS Kabupaten Batang sebesar 12,13 tahun. Hal ini berarti bahwa di Kota Semarang, penduduk usia 7 tahun memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan jenjang D3 (15,53 tahun), sedangkan di Kabupaten Batang penduduk usia 7 tahun memiliki harapan untuk tetap bersekolah adalah hingga menyelesaikan jenjang SMA. HLS kabupaten/kota se Jawa Tengah seperti tertera pada Gambar 3.5 di bawah ini.

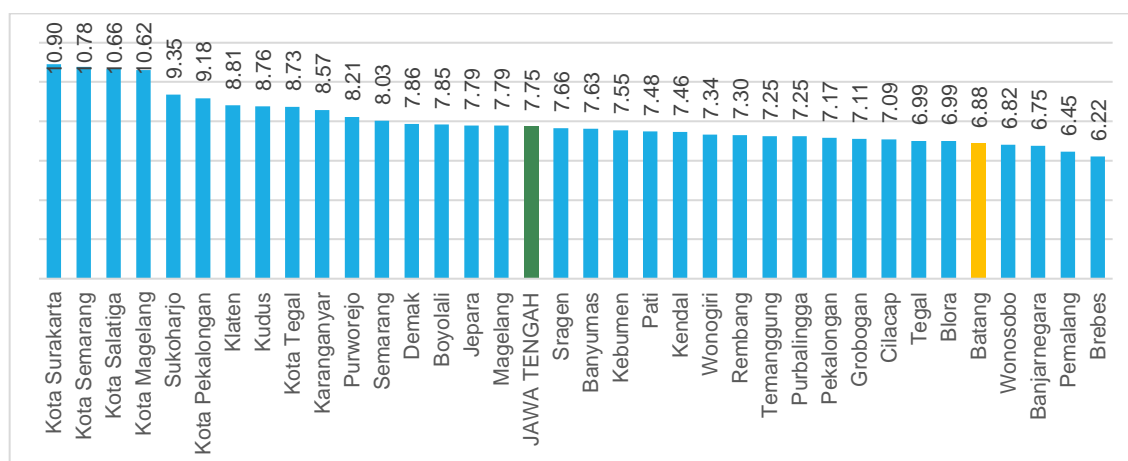
Gambar 3.5 Harapan Lama Sekolah Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi di Jawa Tengah dicapai oleh Kota Surakarta. Kota Surakarta memiliki RLS sebesar 10,90 tahun, sedangkan Kabupaten Batang sebesar 6,88 tahun. Angka capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun atau lebih ini, antara Kabupaten Batang dengan Kota Surakarta terdapat selisih RLS sebesar 4,02 tahun. Capaian Kabupaten Batang di bidang pendidikan pada komponen RLS ini termasuk pada kelompok yang *rendah*, yang hanya lebih baik dari empat kabupaten (Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes) se Jawa Tengah. RLS kabupaten/kota se Jawa Tengah seperti tertera pada Gambar 3.6 di bawah ini.

Gambar 3.6 Rata-rata Lama Sekolah Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021 (Tahun)

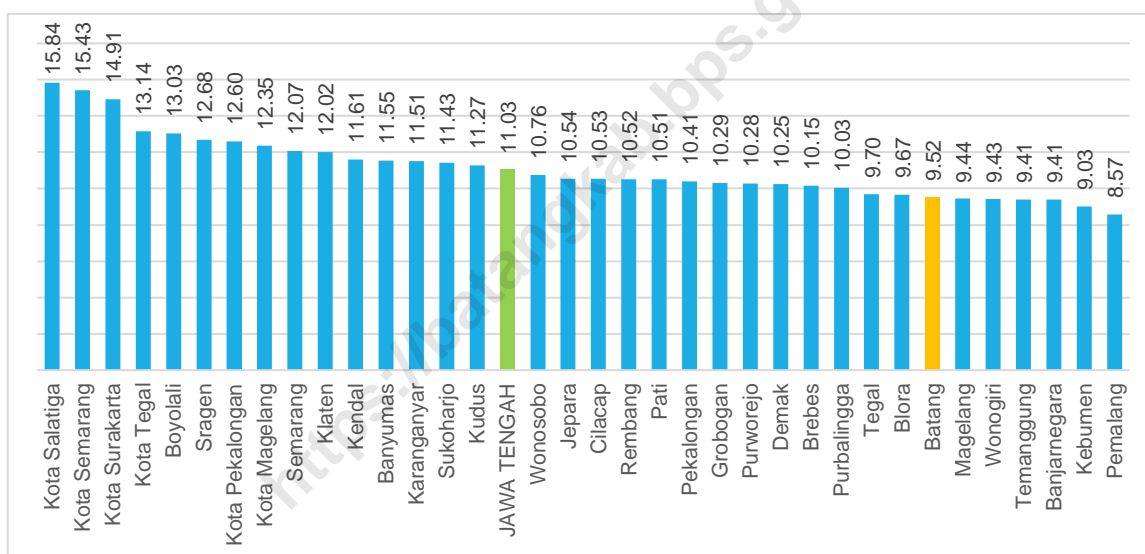


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, capaian bidang pendidikan Kabupaten Batang pada tahun 2021 masih tertinggal. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Batang menempati posisi kelima terendah se-Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah Kabupaten Batang, mengingat pendidikan merupakan salah satu kapabilitas dasar manusia.

Tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Batang mencapai 9,52 juta rupiah, sedangkan PPP yang tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah Kota Salatiga, yang mencapai 15,84 juta rupiah. Capaian Kota Salatiga ini adalah 1,66 kali pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Batang. PPP kabupaten/kota se Jawa Tengah seperti tertera pada Gambar 3.7 berikut.

Gambar 3.7 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah, 2021 (Juta Rupiah)



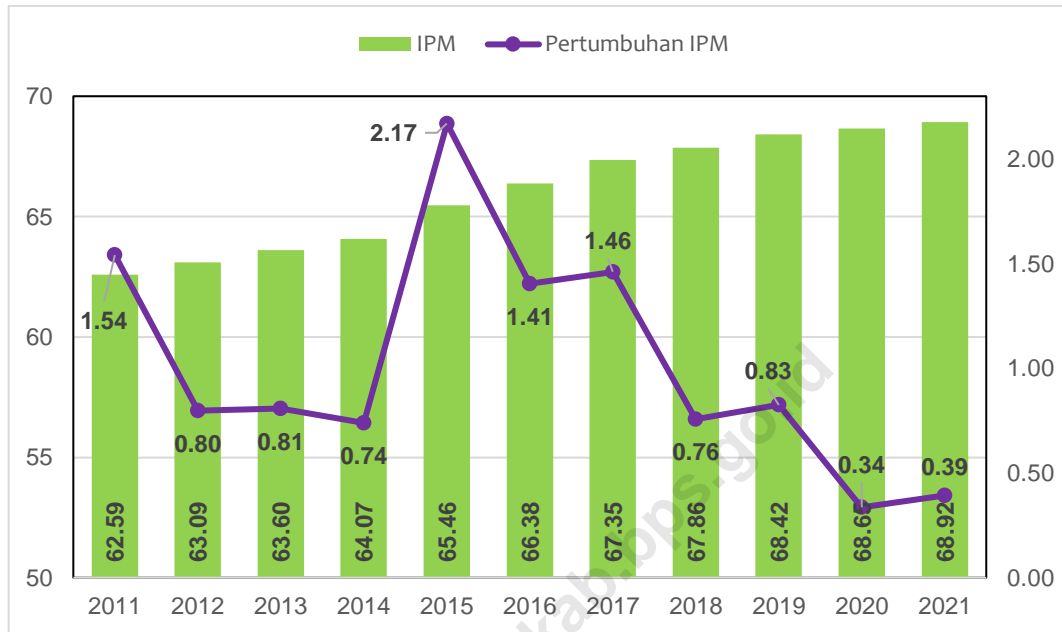
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

3.2 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Batang

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Batang terus mengalami kemajuan selama satu dekade 2011 hingga 2021. IPM Kabupaten Batang meningkat sebesar 6,33 poin, yakni dari 62,59 pada tahun 2011 menjadi 68,92 pada tahun 2021, dengan rata-rata tumbuh sebesar 1,02 persen per tahun. Pada tahun 2015 terjadi pertumbuhan tertinggi sebesar 2,17 persen, kemudian setelah itu sampai tahun 2021 melambat (0,39 persen). Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. Selama dekade tersebut nilai IPM Kabupaten Batang masih

berada dalam posisi “Sedang”. IPM Kabupaten Batang seperti tertera pada Gambar 3.8 di bawah ini

Gambar 3.8 Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Batang, 2011-2021

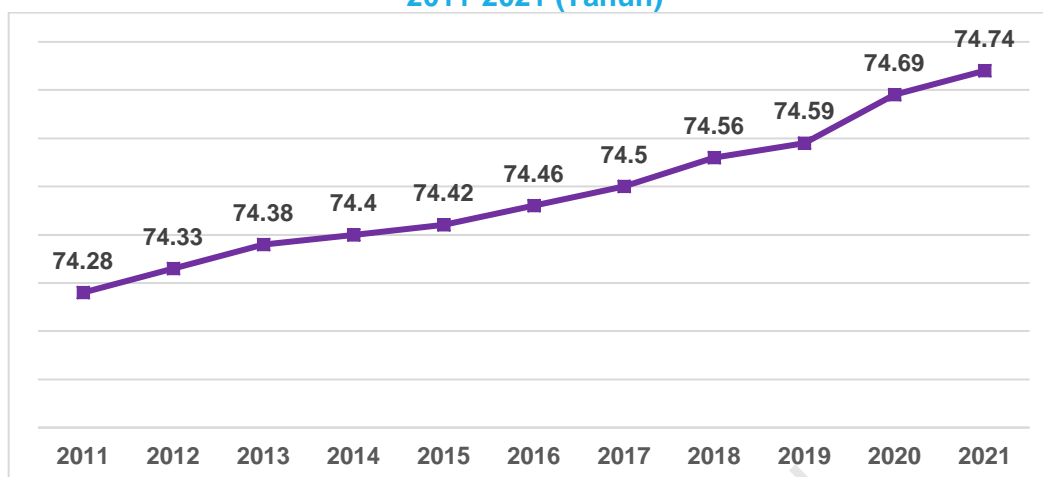


Sumber : BPS Kabupaten Batang

Saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Batang masih berstatus “sedang”, selama periode 2011 hingga 2021 pembangunan manusia Kabupaten Batang belum bisa meningkat ke status “tinggi”, maka IPM Kabupaten Batang yang baik, akan berimbas pada peningkatan status pembangunan manusia di Jawa Tengah..

Capaian IPM Kabupaten Batang pada tahun 2021 merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2011 – 2021 menunjukkan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2011, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Batang sebesar 74,28 tahun, sedangkan pada tahun 2021 mencapai usia 74,74 tahun. Peningkatan nilai UHH Jawa Tengah hingga tahun 2021 menunjukkan indikasi adanya perbaikan pembangunan bidang kesehatan. UHH Kabupaten Batang seperti tertera pada Gambar 3.9 di bawah ini

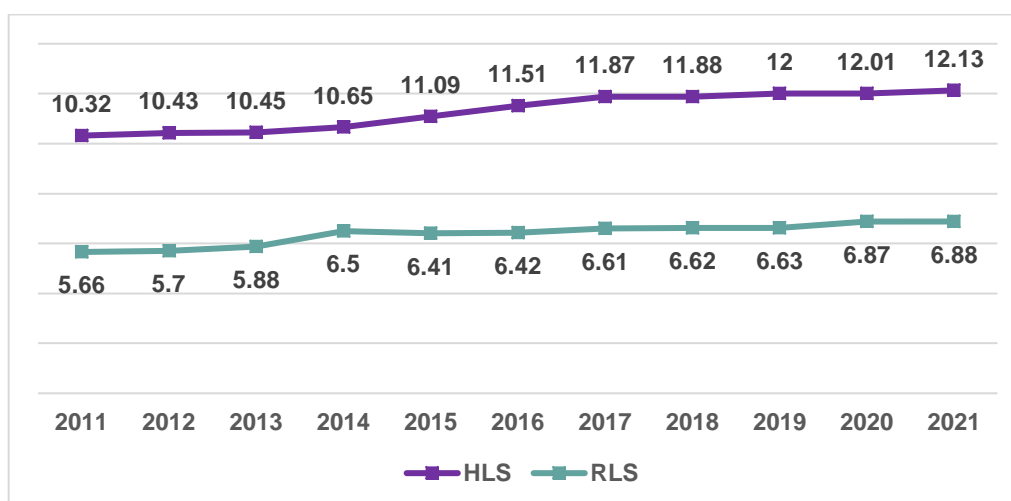
Gambar 3.9 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Batang, 2011-2021 (Tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Batang

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kabupaten Batang sebesar 6,88 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Batang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,88 tahun atau dengan kata lain baru mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VI (putus sekolah di kelas VII). Pada HLS Kabupaten Batang, memberikan harapan yang lebih cerah, yaitu mencapai 12,13 tahun, yang berarti bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2021 diharapkan mampu bersekolah hingga 12,13 tahun atau setara SMA. RLS dan HLS seperti pada Gambar 3.10 di bawah ini.

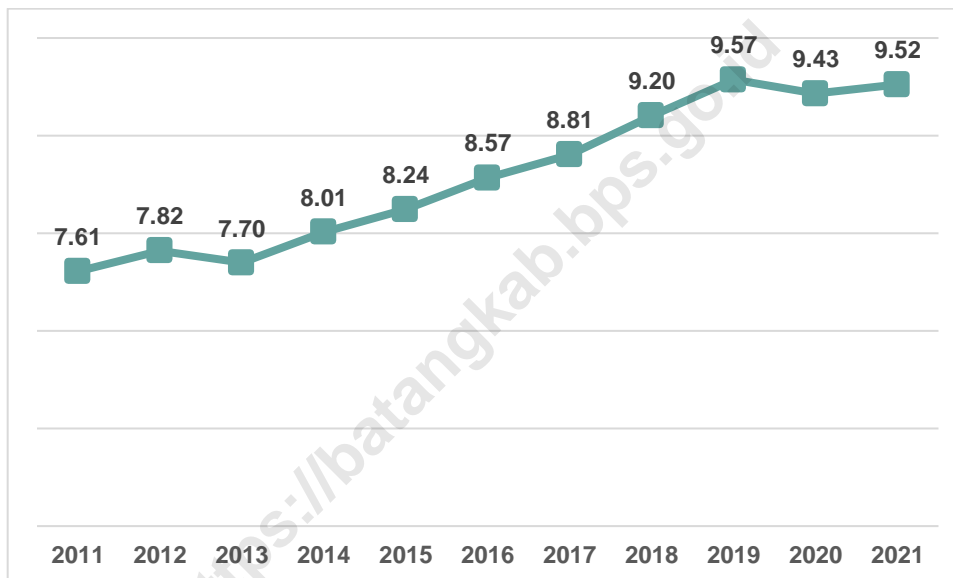
Gambar 3.10 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang, 2011 – 2021 (Tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pengeluaran penduduk bisa menjadi gambaran tingkat kemampuan seseorang. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Batang tahun 2021 telah mencapai 9,52 juta rupiah per tahun. Pengeluaran per kapita Kabupaten Batang terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2019. Selama kurun waktu tersebut, pada tahun 2013 pengeluaran per kapita mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2012, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami peningkatan yang signifikan.

Gambar 3.11 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Batang, 2011–2021 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Batang

Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat melemah, sehingga pada tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan, nilainya mengalami penurunan. Hal ini menjelaskan bahwa krisis global dan terjadinya pandemi memberikan dampak pada perekonomian di Kabupaten Batang, karena diantara semua komponen IPM, komponen pengeluaran per kapita adalah yang paling rentan terkena dampak krisis tersebut. Pada tahun 2021, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Batang kembali membaik menjadi 9,52 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian di Kabupaten Batang pada masa pandemi meskipun nilai ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019.

CAPAIAN KAPABILITAS DASAR PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BATANG

BAB 4

Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih



98,38
persen

121
kematian bayi

148
kematian balita



APS

7-12 tahun : 99,74

13-15 tahun : 96,43

16-18 tahun : 64,95



Pertumbuhan Ekonomi
2021

4,88 persen



Penduduk miskin 2021

9,68 persen

Tingkat Pengangguran Terbuka

6,59 persen



Bab IV. Capaian Kapabilitas Dasar Pembangunan Manusia Kabupaten Batang

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Hal ini dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Pembangunan manusia yang masih terus berlangsung hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Selain itu, masih terdapat persoalan dasar yang harus diselesaikan pada masa mendatang.

4.1 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Capaian IPM Kabupaten Batang merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Salah satu komponen dalam penentuan kualitas hidup manusia adalah kesehatan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang (BPS, 2016). Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang produktif secara sosial ekonomi.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku, dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang, secara fisik jumlah sarana dan tenaga kesehatan tersedia seperti pada Gambar 3.10 di bawah ini.

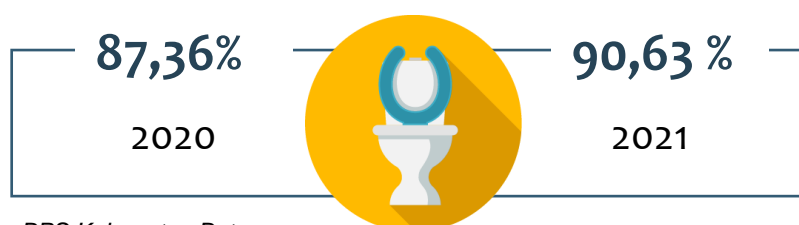
Tabel 4.1. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Batang, 2020-2021

Sarana Kesehatan	Jumlah	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	3	3
Puskesmas	21	21
Apotek	40	40
Dokter Umum	80	86
Dokter Gigi	17	20
Bidan	634	655
Perawat	782	799

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes)

Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang, namun kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (*life style*); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sendiri di Kabupaten Batang, 2020-2021

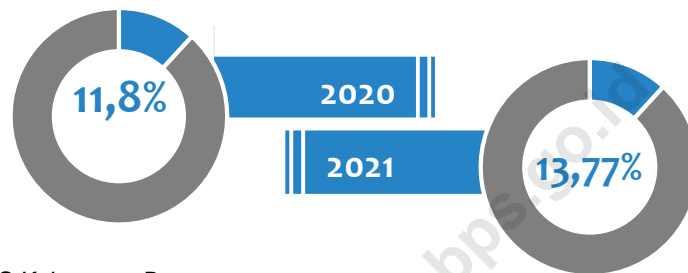


Sumber: BPS Kabupaten Batang

Gambar 4.1 diatas adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021, yang memperlihatkan bahwa terdapat 90,63 persen rumah tangga di Kabupaten Batang yang telah memiliki jamban sendiri. Keadaan ini membaik dibanding bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang terdapat 87,36 persen rumah tangga di Kabupaten Batang yang memiliki jamban sendiri.

Selain itu, terdapat 13,77 persen rumah tangga yang jenis lantai rumahnya masih tanah, seperti terlihat pada Gambar 4.2 di bawah ini. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena jika masih banyak rumah tangga yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat, maka harapan untuk mencapai kondisi penduduk Kabupaten Batang dengan derajat kesehatan yang baik mungkin akan sulit tercapai. Sebagai dampaknya, maka pada kualitas pembangunan manusia adalah lambatnya peningkatan komponen kesehatan.

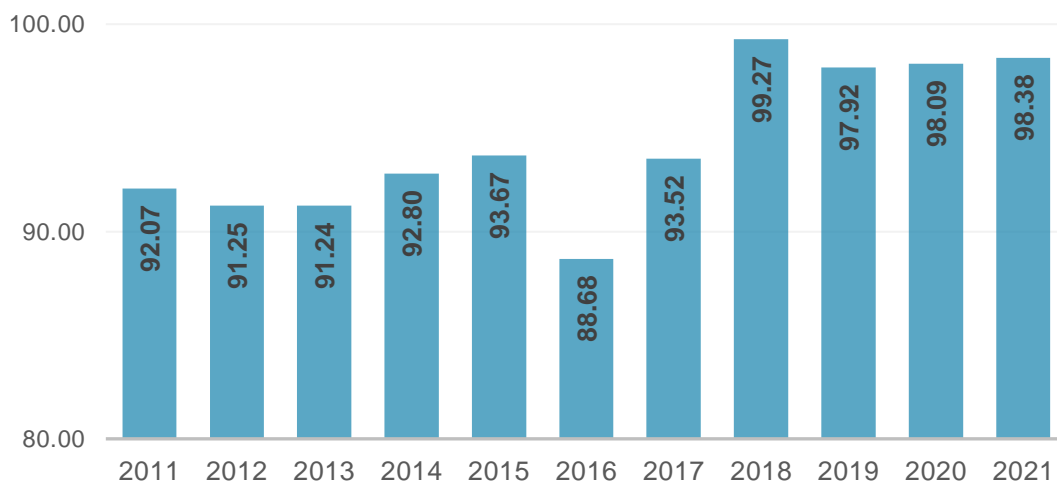
Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Tanah di Kabupaten Batang, 2020-2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang

Untuk penggunaan sumber air bersih, pada tahun 2021 masih ada sebanyak 1,62 persen rumah tangga belum menggunakan sumber air bersih, walaupun secara capaian telah sedikit membaik dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,91 persen rumah tangga. Sumber air minum bersih meliputi air kemasan, air isi ulang, ledeng, air sumur bor/pompa, dan sumur terlindungi serta mata air terlindungi. Gambar 4.3 berikut adalah jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih.

Gambar 4.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih di Kabupaten Batang, 2011-2021 (persen)

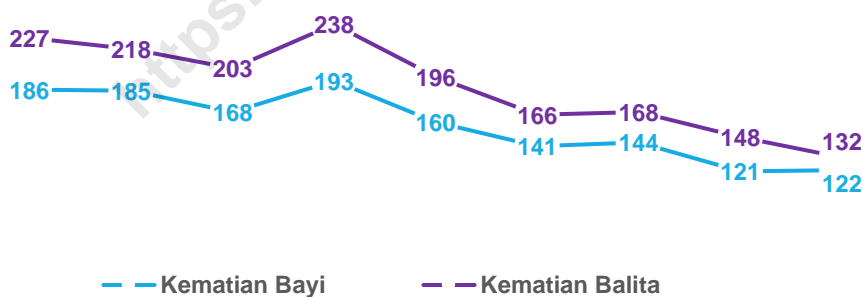


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan usia, kelompok yang paling rentan terkena gangguan kesehatan adalah balita, terutama pada kelompok umur kurang dari 1 tahun (bayi), karena daya tahan tubuh mereka masih belum sempurna. Angka Kematian Balita (AKBA) memiliki hubungan yang erat dan terbalik dengan UHH, karena didalam AKBA tercakup pula Angka Kematian Bayi (AKB) yang merupakan komponen input dalam penghitungan UHH. Artinya, bahwa semakin rendah AKBA maka UHH akan semakin tinggi. Penurunan AKB dan AKBA merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals (SDG's)* dalam bidang kesehatan. SDG's menargetkan untuk mengakhiri dan mencegah AKB dan AKBA pada tahun 2030.

Pada tahun 2013, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, jumlah kematian bayi di Kabupaten Batang mencapai 186 jiwa. Selama 7 tahun terakhir, jumlah kematian bayi mengalami penurunan yang cukup signifikan, hingga pada tahun 2021 jumlah kematian bayi di Kabupaten Batang sebanyak 122 jiwa. Untuk jumlah kematian balita, pada tahun 2013 mencapai 227 jiwa, terus membaik hingga pada tahun 2021 sebanyak 132 jiwa. Gambar 4.4 di bawah ini memperlihatkan AKBA dan AKB selama kurun waktu 2013 – 2021.

Gambar 4.4. Tren Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Balita di Kabupaten Batang, 2013-2021



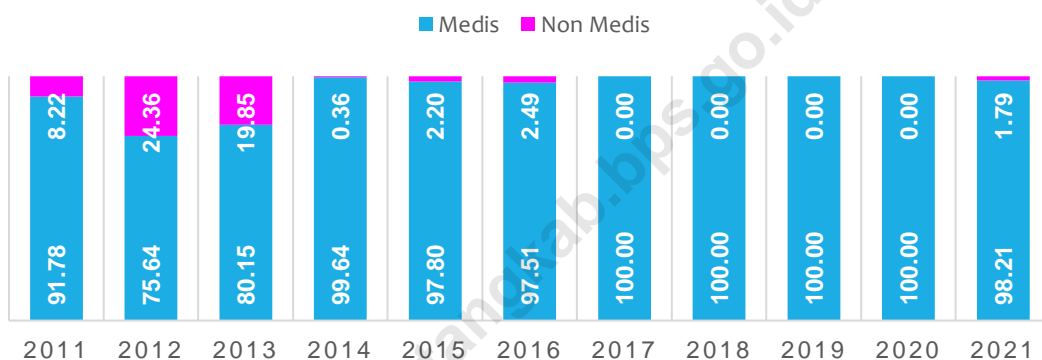
Sumber: Dinas Kesehatan

Membbaiknya tingkat kesehatan masyarakat, yaitu dengan makin berkurangnya jumlah kematian bayi dan balita di Kabupaten Batang, merupakan dampak dari semakin meningkatnya kesadaran penduduk untuk melakukan persalinan yang aman bagi ibu, yaitu persalinan yang dibantu oleh tenaga persalinan terlatih atau tenaga medis.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis cenderung meningkat. Pada tahun 2011, terdapat 91,78 persen kelahiran

ditolong oleh tenaga medis, namun pada tahun 2012 kondisinya menjadi kurang baik, yakni turun menjadi 75,64 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2020 sudah mencapai 100,00 persen. Namun demikian, pada tahun 2021 persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis kembali berkurang menjadi 98,21 persen. Jika capaian ini dapat ditingkatkan, maka kematian balita bisa semakin ditekan, dan target SDG's sebagaimana seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 pada tahun 2030, tidak mustahil dapat tercapai. Persalinan menurut penolong medis dan non medis seperti terlihat pada Gambar 4.5 di bawah ini.

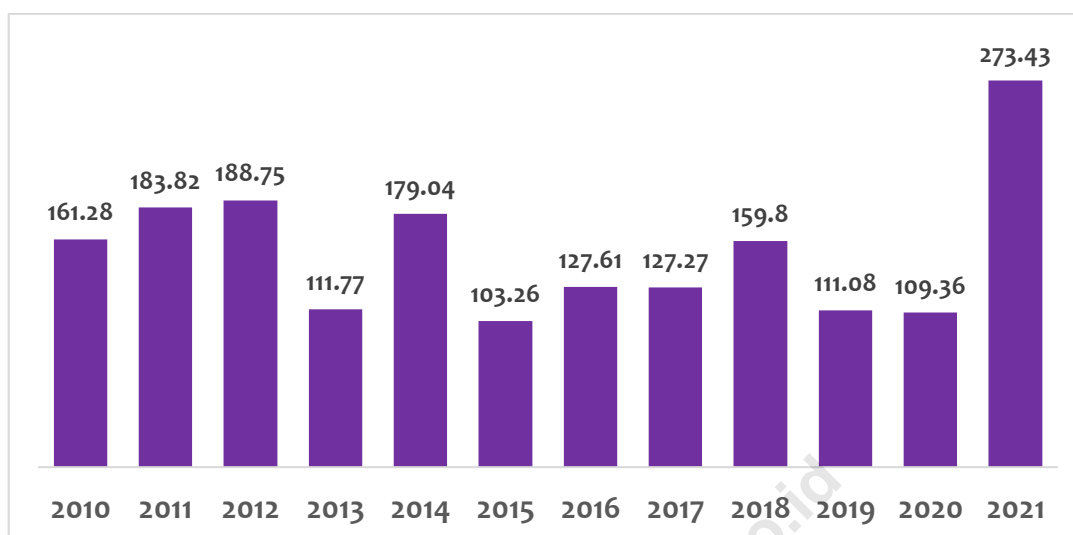
Gambar 4.5 Proporsi Persalinan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Kabupaten Batang, 2011 – 2021 (persen)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Selain kematian bayi dan balita, Angka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan salah satu indikator penting dalam melihat capaian derajat kesehatan suatu wilayah. SDG's pada tahun 2030, seluruh negara berusaha mencapai rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. AKI Kabupaten Batang selama tahun 2010 hingga 2021, mengalami fluktuasi dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021, yakni AKI Kabupaten Batang mencapai 273,43. Hal ini disebabkan oleh merebaknya wabah covid-19, yang membuat kesehatan masyarakat pada umumnya sangat rentan, sehingga mengakibatkan kematian ibu yang disertai Covid-19 sangat tinggi. Angka kematian ibu di Kabupaten Batang tahun 2010 hingga tahun 2021 seperti terlihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.6. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Batang, 2010-2021



Sumber: Dinas Kesehatan

4.2 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan, misalnya dengan memperluas cakupan pendidikan formal. Hingga saat ini, berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS, serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dasar manusia.

Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi, yakni manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatannya agar dapat hidup lebih lama, juga akan memiliki peluang yang besar dalam mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang kehidupan manusia.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS dan HLS adalah dengan mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, sehingga bisa memperkecil angka putus sekolah, meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan antar jenjang pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan sarana dan prasarannya. Kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan untuk pembangunan manusia di bidang pendidikan

antara lain: Program Indonesia Pintar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dengan Kartu Indonesia Pintar-nya (KIP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, program revitalisasi fungsi sekolah dengan menerapkan sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta bantuan perbaikan infrastruktur sekolah yang dikemas dalam bantuan operasional sekolah atau BOS. Pada Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan upaya Kabupaten Batang dalam menyediakan sarana pendidikan sampai dengan kondisi tahun 2021.

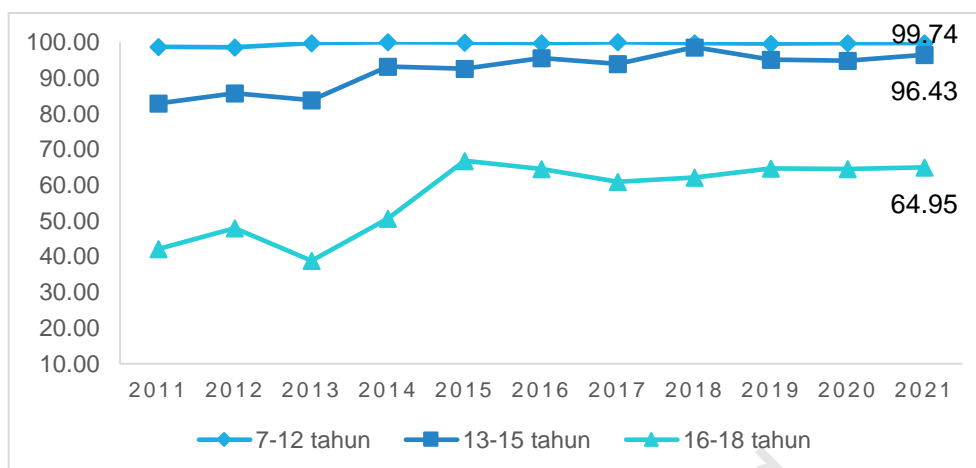
Tabel 4.2. Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Batang, 2020-2021

Sarana Pendidikan	Jumlah	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
TK	290	292
RA	125	126
SD	459	454
MI	124	124
SMP	72	72
MTs	35	36
SMA	15	15
SMK	29	29
MA	14	14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari keahlian/keterampilan, serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut dapat digambarkan pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan yang tinggi, dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan kerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan, juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Keadaan kualitas sumber daya manusia penduduk Kabupaten Batang dari tahun 2011 hingga tahun 2021, utamanya yang telah mengikuti sekolah formal, terlihat pada Gambar 4.7 di bawah ini.

Gambar 4.7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Batang, 2011 – 2021 (persen)



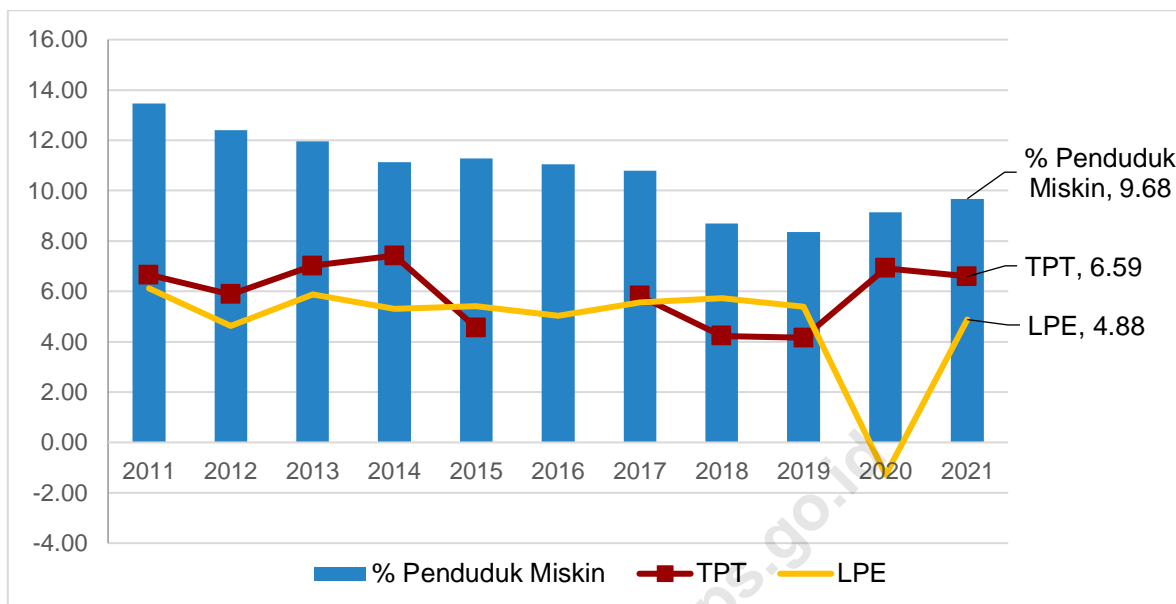
Sumber: BPS Kabupaten Batang

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Gambar 4.7 di atas memperlihatkan bahwa indikator pendidikan di Kabupaten Batang menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Angka partisipasi sekolah, meskipun lambat namun menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Namun yang patut dicermati yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, yang pada kedua kelompok tersebut masih terdapat penduduk yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa karena putus sekolah, atau bahkan tidak/belum pernah sekolah, padahal kedua kelompok umur penduduk tersebut merupakan kelompok umur wajib belajar 9 tahun.

4.3 Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan, diantaranya adalah aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, yang kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Sayangnya, menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah, karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh antara satu dimensi dengan dimensi yang lainnya.

Gambar 4.8. Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang, 2011 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2011 tercatat sebesar 6,12 persen dan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang pada tahun 2019 sebesar 5,39 persen. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2011, tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang mencapai 13,47 persen dan mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2019 menjadi 8,35 persen. Kondisi ini juga didukung dengan semakin berkurangnya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang, yang pada tahun 2011 mencapai 6,66 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja, ada sekira 7 orang yang menganggur, dan terus membaik, hingga pada tahun 2019 menjadi 4,16 persen atau hanya ada sekira 4 orang yang menganggur.

Kondisi pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kabupaten Batang. Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami *kontraksi* sebesar 1,29 persen, yang berimbas pada persentase penduduk miskin meningkat menjadi 9,13 persen, dan tingkat pengangguran juga meningkat hingga 6,92 persen.

Pada Tahun 2021, kondisi perekonomian Kabupaten Batang kembali membaik, dengan ekonomi yang tumbuh positif kembali, sebesar 4,88 persen, dan tingkat pengangguran yang berkurang atau sedikit membaik menjadi sebesar 6,59 persen. Namun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang pada 2021 tetap bertambah, yaitu menjadi sebesar 9,68 persen, meskipun peningkatannya tidak setinggi pada tahun 2019

sebesar 8,35 persen menjadi 9,13 pada tahun 2020.

Pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang secara umum, setiap tahunnya masih bergerak ke arah yang lebih baik, yaitu tampak dari nilai pengeluaran per kapita yang terus meningkat (yang merupakan gambaran dari tingkat pendapatannya), serta didukung oleh kondisi tingkat pengangguran yang mulai membaik pasca pandemi.

Namun demikian, permasalahan pembangunan tidak bisa dituntaskan hanya dengan mengatasi salah satu komponen saja. Oleh karena itu, hendaknya fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, yang tidak hanya terpaku pada komponen pembentuk IPM saja, tetapi juga pada berbagai indikator yang mempengaruhinya, untuk kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2021. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang 2021. Batang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. 2022. Kabupaten Batang Dalam Angka 2021. Batang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. 2022. Profil Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2021. Batang: Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- Ekonomi.bisnis.com. 2022. "Indeks Pembangunan Manusia 2021 Tumbuh Melambat, Kok Bisa?", Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211116/9/1466566/indeks-pembangunanmanusia-2021-tumbuh-melambat-kok-bisa>. Diakses tanggal 24 Februari 2022. Okezone.com (2022).
- "Fakta Penting ASI bagi Kebutuhan Gizi Bayi Usia 0-6 Bulan". Diakses dari <https://edukasi.okezone.com/detail/775117/8-fakta-penting-asibagi-kebutuhan-gizi-bayi-usia-0-6-bulan>. Diakses tanggal 5 Maret 2022. Tampubolon, M. (2001).
- Pemerintah Kabupaten Batang. 2022. Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun Anggaran 2021. Batang: Pemerintah Kabupaten Batang.
- Pendidikan, Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan Nomor 32 November 2001.
- Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BATANG**

Jalan Pemuda No. 90 Batang 51215
Telp/Fax (0285)391004
Homepage: batangkab.bps.go.id